

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai pihak di Negara Indonesia perlu senantiasa memberi perhatian terhadap perkembangan ekonomi. Pemerintah Indonesia berhasil melakukan pembangunan pada daerah atau wilayah pelosok yang dapat menjangkau segenap warga hal ini juga berkat peran para pelaku ekonomi di daerah tersebut. Saat ini kegiatan ekonomi pedesaan berkembang cepat. Pada data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menunjukkan mengenai perkembangan perekonomian pada pedesaan yang mana sebagian besar desa yang ada di Indonesia telah berstatus berkembang yang sebanyak 55.369 desa (73,40%), yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu desa tertinggal jumlahnya 19,17% atau 14.461 desa, dan mandiri jumlahnya 7,48% atau 5.606 desa. Berdasarkan data yang ada terdapat indeks dari pembangunan desa yang mengalami perbaikan status desa yakni pada desa yang tertinggal terjadi penurunan sebesar 6.518 desa jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan desa dengan status mandiri bertambah sebesar 2.665 desa (BPS, 2019). Sejalan dengan perkembangan perekonomian, proses transaksi menjadi lebih mudah bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana maupun kekurangan dana dengan adanya pihak perantara atau disebut dengan lembaga keuangan dan salah satu lembaga tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 bahwa LPD adalah badan usaha keuangan atau lembaga bagian keuangan yang

dimiliki oleh pihak desa, yang berada di lingkungan desa dan digunakan oleh krama desa. Adanya Lembaga Perkreditan Desa yang menjadi strategi kebijakan yang dapat menjangkau kelompok ataupun individu di kalangan masyarakat pedesaan dalam upaya mempercepat peningkatan taraf hidupnya maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di setiap daerah berdampak besar bagi masyarakat golongan ekonomi lemah maupun menengah secara umum berdasarkan tujuan dan fungsinya. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya LPD memiliki nilai lebih karena berada pada suatu desa adat dan pengelolaannya langsung dilakukan oleh krama desa ataupun sebagai pengawas sehingga informasi terkait LPD lebih mudah diketahui serta dapat dengan mudah membangun kepercayaan maupun kenyamanan dari krama desa terhadap LPD.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan pendirian LPD yang sudah dilaksanakan pada saat berlakunya peraturan tentang LPD tersebut. Pendirian LPD di masing-masing wilayah Kabupaten Jembrana merupakan suatu program pemerintah Jembrana untuk pengentasan kemiskinan di Jembrana. LPD didirikan sesuai dengan karakteristik desa setempat dan kapasitas ekonomi desa yang ada serta modal yang diberikan oleh pihak ketiga ataupun pemerintah pusat. LPD ini terus berkembang di setiap daerah dengan membantu masyarakat dalam memperoleh dana untuk kebutuhannya.

LPD memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun pemerintah Desa, namun kenyataannya pada saat ini sering terjadi permasalahan pada LPD

baik dari segi internal maupun eksternal. Banyak LPD yang mengalami kebangkrutan atau memiliki tingkat klasifikasi kesehatan yang kurang sehat. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten Jembrana dimana terdapat 64 LPD yang tersebar di 5 Kecamatan. Dalam setiap kecamatan yang ada terdapat LPD yang memiliki tingkat kesehatan cukup sehat sampai tidak sehat dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Data tersebut ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Klasifikasi Kesehatan LPD per Kecamatan di Kabupaten Jembrana

No	KECAMATAN	2017				2018				2019			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1	Pekutatan	13	0	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0
2	Mendoyo	16	1	2	0	16	0	1	2	16	2	0	1
3	Jembrana	7	1	0	1	7	2	0	0	8	1	0	0
4	Negara	10	0	0	0	9	0	1	0	9	0	1	0
5	Melaya	10	2	1	0	11	0	0	2	11	0	0	2
TOTAL		56	4	3	1	55	3	2	4	56	4	1	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2020)

Merujuk tabel 1.1, dapat diketahui bahwa permasalahan kesehatan pada LPD terus terjadi pada setiap tahunnya. Tingkat kesehatan LPD ini dinilai dengan pendekatan kualitatif terdiri dari lima faktor yang berpengaruh yaitu: (1) permodalan, (2) kualitas aktiva produktif, (3) manajemen, (4) earning, dan (5) likuiditas. Dari ke lima faktor tersebut dapat diketahui bahwa kinerja yang dilakukan LPD sangat berperan penting terhadap tingkat kesehatan dan kegiatan operasional yang dilakukan. Dengan adanya penilaian mengenai tingkat kesehatan

LPD, maka dapat dilihat bagaimana kinerja LPD dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selain tingkat kesehatan LPD yang ada di Kabupaten Jembrana, terdapat dua LPD yakni LPD Taman Sari dan LPD Desa Pekraman Tuwed mengalami permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah adanya tindak kecurangan dimana dari hasil penelusuran terdapat pengurus yang memakai dana LPD dan belum menyelesaikan kewajibannya. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi nasabah mengeluh karena tidak bisa mengambil uang yang disimpan di LPD. Dimana pihak LPD memberikan alasan bahwa tidak adanya dana untuk diberikan kepada nasabah. Jadi nasabah yang akan mengambil dana hanya dijanjikan saja tanpa adanya realisasi pencairan dana. Dengan adanya kasus tersebut membuat kegiatan operasional LPD terkendala akibat banyaknya kredit macet yang ada. Hal ini pun sudah ditangani dengan diajukannya laporan pada Kejaksaan Negeri Jembrana (Radar Bali, 2018).

Selain itu pada Kecamatan Mendoyo terdapat satu LPD yang tidak beroperasi yaitu LPD Delodbrawah, sehingga kegiatan LPD pada desa tersebut tidak dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh kurang baiknya kinerja organisasi dalam pengelolaan LPD yang tidak sesuai dengan standar operasional yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 mengenai Lembaga Perkreditan Desa. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang lebih mengenai kinerja organisasi sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pada LPD dan dapat memperkecil permasalahan-permasalahan yang ada pada LPD, untuk itu diberlakukannya

penilaian kinerja pada LPD sebagai evaluasi kinerja periode sebelumnya dan dasar menyusun strategi berikutnya.

Kinerja (*performance*) organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian suatu program kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi pada organisasi yang dijalankan melalui perencanaan strategis (Sedarmayanti, 2011:357). Kinerja organisasi yang baik harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik pula (Wiguna, 2016). Dimana sistem pengendalian internal ini meliputi lingkungan pengendalian pada suatu perusahaan, penilaian resiko, sistem informasi serta komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Adanya sistem pengendalian internal ini, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi, hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal dapat digunakan sebagai jaminan untuk meyakinkan bahwa didalam mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dapat dicapai secara efisien dan efektif, terdapatnya penyajian mengenai laporan keuangan yang terpercaya serta ketaatan akan perundang-undangan maupun aturan yang berlaku. Selain itu, dapat sebagai pemberian masukan kepada pemimpin dalam melakukan koreksi atas permasalahan pencapaian kinerja dan memberikan opini atas kinerja organisasi (Wiguna, 2016). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiguna (2016) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal yang ada memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Senada dengan itu, Azlina dan Amelia (2015) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

Aspek lain yang juga dapat mempengaruhi suatu kinerja pada organisasi adalah *Good Corporate Governance* atau disingkat dengan GCG. Tata kelola

perusahaan yang baik atau disebut dengan GCG adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar di dalam melakukan proses suatu usaha dan kegiatan dalam mengelola perusahaan yang dilandasi oleh peraturan yang ada serta etika bisnis. Dengan adanya GCG dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi yang berdampak pada peningkatan dari kinerja organisasi. GCG bisa membantu mencegah terjadinya permasalahan, kecurangan ataupun kejahatan yang berkaitan dengan keuangan organisasi (Mulyawan, 2017). Sehingga pengaplikasian prinsip-prinsip GCG sangat penting diterapkan dalam menjalankan suatu usaha. Prinsip yang harus dimiliki oleh setiap organisasi yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan. GCG menjadi salah satu faktor dalam menentukan maupun menilai kesehatan suatu sistem dan memberikan kemampuan bagi suatu usaha untuk bertahan pada guncangan ekonomi yang tentu secara otomatis dapat meningkatkan nilai dari LPD yang tercermin dari kinerja LPD tersebut (Jayantari dan Gorda, 2020). Menurut Sarbah dan Xiao (2015) GCG yang baik dapat berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kinerja organisasi. Mulyawan dkk (2017) menyatakan bahwa GCG memiliki pengaruh yang positif pada kinerja LPD. Hal ini juga dikatakan oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Azlina (2015), Atmadja dkk (2014), Suparsabawa dan Kustina (2018).

Selain menerapkan GCG, LPD yang merupakan lembaga keuangan milik desa juga menerapkan awig-awig desa pekraman sebagai landasan hukum. Awig-awig dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi baik atau sebuah ketentuan dalam mengontrol tata krama yang ada dari pergaulan hidup di masyarakat desa untuk menciptakan sebuah tata kehidupan masyarakat yang ajeg atau baik. Dengan

adanya awig-awig ini dapat memberikan sanksi tegas sehingga mampu memberikan rasa jera kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayantari dan Gorda (2020) menyatakan bahwa keberadaan awig-awig berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Hal senada juga dikatakan oleh Atmadja dkk (2014) yang menunjukkan bahwa proteksi awig-awig memiliki pengaruh terhadap kinerja LPD.

Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab kebahagiaan, yang menjadi nilai dari kearifan lokal masyarakat Hindu yang berada di Provinsi Bali yang manatelah digunakan sebagai budaya organisasi di Bali secara umumnya (Wiguna, 2016). Konsep ini dilandasi atas prinsip keharmonisan hidup yang terdiri dari tiga unsur saling berkaitan yakni parahyangan merupakan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, pawongan yaitu keselarasan hubungan antara sesama manusia, serta palemahan yaitu selarasnya hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar.

Adanya Tri Hita Karana sebagai landasan dalam menjalankan suatu organisasi tentu dapat meningkatkan kinerja pada setiap individu maupun organisasi, dimana dalam mengoptimalkan kinerja suatu organisasi yang pada dasarnya harus mempunyai sebuah keyakinan, dimana kinerjanya dipengaruhi dengan nilai-nilai baik yang bersumber dari keyakinan ataupun kekuatan pada diri, lingkungan tempat kerja dan hubungan dengan sesama karyawan (Mulyawan, 2017). Selain itu juga dapat mencegah terjadi masalah atau tindak kecurangan yang ada pada organisasi. Dalam penelitian ini Tri Hita Karana digunakan sebagai

variabel moderasi, yang mana dapat mempengaruhi dari prinsip sistem pengendalian internal, GCG dan keberadaan awig-awig terhadap kinerja organisasi. Dimana dalam penerapan konsep tersebut diperlukannya budaya organisasi yang baik untuk menunjang kinerja pada organisasi. Selain itu, dengan penerapan sistem pengendalian, GCG dan awig-awig disebuah LPD ditambah dengan adanya budaya tri hita karena yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya oleh para karyawan, maka kinerja LPD tersebut dapat mencapai tingkat yang optimal yang tentunya dapat menguntungkan bagi semua pihak. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Jayantari dan Gorda (2020) yang menjelaskan bahwa Tri Hita Karana memoderasi hubungan GCG dengan keberadaan awig-awig terhadap kinerja keuangan LPD. Begitu juga dengan penelitian Wiguna (2016) yang mengatakan bahwa Tri Hita Karana dapat menjadi pemoderasi hubungan antara sistem pengendalian terhadap kinerja organisasi.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali pengaruh sistem pengendalian internal, GCG dan keberadaan awig-awig terhadap kinerja organisasi dengan Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu seperti Mulyawan dkk (2017) yang menyatakan bahwa GCG berdampak positif secara signifikan terhadap suatu kinerja LPD dengan adanya Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan GCG terhadap kinerja LPD, sedangkan Saputri (2019) menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan Yuliantari dkk (2020) menyampaikan bahwa Tri Hita Karana sebagai pemoderasi melemahkan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan LPD . Selain itu peneliti menggunakan LPD sebagai subjek penelitian dimana penelitian dilakukan di kecamatan Mendoyo, kabupaten Jembrana karena

jumlah LPD di Jembrana cukup sedikit. kabupaten Jembrana memiliki jumlah LPD paling sedikit setelah kota Denpasar, dengan sedikitnya jumlah kantor LPD yang ada tentu peneliti dapat melakukan penelitian pada semua kantor LPD sehingga semua lapisan di LPD dapat tersentuh pada penelitian ini dan selain itu terdapat permasalahan pada LPD kecamatan Mendoyo dimana terdapat satu LPD yang tidak beroperasi serta terdapat LPD yang memiliki klasifikasi kesehatan kurang sehat.

Berdasarkan pemaparan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, GCG Dan KeberadaanAwig-Awig Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Dengan Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada LPDDi Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk latar belakang yang dipaparkan, beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana tingkat kesehatan LPD yang kurang sehat terus terjadi setiap tahunnya hal ini diakibatkan kurangnya kinerja LPD hal ini dapat dilihat dengan adanya permasalahan kredit macet yang belum dapat diatasi setiap tahun, permasalahan tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan adanya LPD yang tidak beroperasi dengan baik.
2. Dari hasil observasi peneliti, kinerja organisasi pada LPD belum efektif karena kurangnya sistem pengendalian internal, GCG dan kurang

penegasan dalam awig-awig yang dilakukan oleh pengurus LPD sehingga masih terjadinya permasalahan-permasalahan pada LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, batasan masalah yang digunakan peneliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPD yaitu sistem pengendalian internal, GCG dan keberadaan awig-awig dengan Tri Hita Karana sebagai moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja LPD di kecamatan Mendoyo ?
2. Bagaimanakah pengaruh GCG terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo ?
3. Bagaimanakah pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo?
4. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo dengan Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimanakah pengaruh GCG terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo dengan Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimanakah pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo dengan Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian, dapat dipaparkan tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui :

1. Pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap kinerja LPD di kecamatan Mendoyo.
2. Pengaruh GCG terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo.
3. Pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo.
4. Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo dengan Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi.
5. Pengaruh GCG terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo dengan Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi.
6. Pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mendoyo dengan Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan atau sebagai bahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, GCG dan keberadaan awig-awig terhadap kinerja suatu organisasi dengan variabel pemoderasi yaitu tri hita karana dari suatu lembaga keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan terkait implementasi bidang akuntansi khususnya Sistem Pengendalian Internal, GCG, Budaya organisasi serta Bank dan Lembaga Kredit Lainnya yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Untuk Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil studi ini dapat melengkapi kepustakaan sebagai referensi serta dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, GCG dan keberadaan awig-awig terhadap kinerja LPD, dimana variabel pemoderasinya adalah tri hita karena.

c. Untuk Lembaga Perkreditan Desa

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan seperti kredit macet dan tindak kecurangan lainnya sehingga dalam pengelolaan dana masyarakat desa dapat lebih baik.